BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

2.1 Manajemen

Dalam memberikan pengertian manajemen, penulis menggunakan dua pendekatan yang lazim digunakan, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. kata "manajemen" berasal dari bahasa latin "manus" yang berarti "tangan" dan "agere" yang berarti "melakukan". Dari dua kata tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamnya merupakan arti secara etimologi. Selanjutnya kata "manus" dan "agere" digabung menjadi satu kesatuan kata kerja "managere" yang mengandung arti "menangani". Pengertian ini dalam ilmu ketatabahasaan disebut sebagai pengertian secara terminologi. "Managere" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja menjadi "to manage" dengan kata benda "management". Julukan bagi orang yang melakukan kegiatan managenent disebut manager atau manajer (dalam bahasa Indonesia). sedangkan dalam bahasa Prancis disebut "ménagement" yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata "management" dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti "pengelolaan"

Wijayanti memandang manajemen secara lebih detail dengan merinci pengertian sebagai berikut :

(1) Manajemen sebagai seni Pandangan ini mengadopsi dari pendapat Mary Parker Pollet, yang berpendapat bahwa manajemen merupakan seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

(2) Manajemen sebagai proses Pandangan tersebut diadopsi dari pendapat Stoner, dimana manajemen dimaknai sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya lainnya agar dapat secara maksimal mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

(3) Manajemen sebagai ilmu dan seni Pandangan tersebut diadopsi dari apa yang disampaikan Luther Gulick, dimana manajemen dimaknai sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi/perusahaan serta membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

(4) Manajemen sebagai profesi Pandangan ini diadopsi dari apa yang dikemukakan Edgar H. Schein, dimana manajemen dipandang sebagai suatu profesi yang menuntut seseorang untuk bekerja secara profesional. Manajemen sebagai profesi ini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah:

   (a) Para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum.

   (b) Para profesinal mendapatkan status mereka karena berhasil mencapai standart prestasi kerja tertentu.

   (c) Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat.

(Menurut Winda Sari 2012), Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

(Menurut Ismail Solihin 2012) Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

(Usman Effendi 2014), Manajemen sebagai suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian, Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan didalamnya menjelaskan tentang gejala-gejala manajemen, gejala gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip yang

diwujudkan dalam bentuk suatu teori. Sedangkan manajemen sebagai suatu seni, disini memandang bahwa di dalam mencapai suatu tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, nah bagaimana cara memerintahkan kepada orang lain agar orang lain agar mau bekerja sama. Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian manajemen yang dikemukakan para ahli dapat ditemukan dalam banyak literatur dan merujuk pada persepsi masing-masing. Konsekuensinya adalah cenderung memunculkan pengertian yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan beberapa pandangan mengenai pengertian manajemen, adalah :

(1) Manajemen dipandang sebagai suatu proses mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya melalui interaksi sumber daya-sumber daya dan pembagian tugas dengan profesional.

(2) Manajemen dipandang sebagai upaya-upaya yang dilakukan orang untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi melalui proses optimasi sumber daya manusia, material dan keuangan.

(3) Manajemen dipandang sebagai bentuk koordinasi dan pengintegrasian dari berbagai sumber daya (manusia dan cara) untuk menyelesaikan tujuan-tujuan khusus dan tujuan-tujuan yang berfariasi (umum).

(4) Manajemen dipandang sebagai suatu bentuk kerja yang melingkupi koordinasi sumber daya-sumber daya manusia-tanah, tenaga kerja, dan modal untuk menyelesaikan target-target organisasi.

Dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas tersebut, pada intinya merujuk pada suatu kesimpulan pokok, yaitu adanya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, baik tujuan yang bersifat khusus maupun tujuan yang bersifat umum. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan dengan cara interaksi, koordinasi, pengintegrasian, dan pembagian tugas secara profesional dan proporsional untuk mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia (tenaga kerja), material (tanah), keuangan (modal), maupun cara yang digunakan. Dalam konteks ini, profesional dimaknai sebagai bentuk pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan sumber daya-sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Sedangkan proporsional dimaknai sebagai pembagian tugas yang seimbang antara kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya dengan beban kerja yang harus ditunaikan. Sehingga dengan upaya ini, setiap sumber daya manusia yang terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut tidak kelebihan beban yang akan berakibat pada lambannya pencapaian tujuan dimaksud bahkan terjadi kegagalan.

2.2 Manajemen Bencana

Segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan terkait bencana sebelum, saat, dan setelah bencana disebut sebagai manajemen penanggulangan bencana. Dikembangkan dari fungsi manajemen klasik, manajemen penanggulangan bencana adalah proses yang dinamis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian, dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Dalam proses ini, berbagai organisasi harus bekerja

sama untuk mencegah, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana.

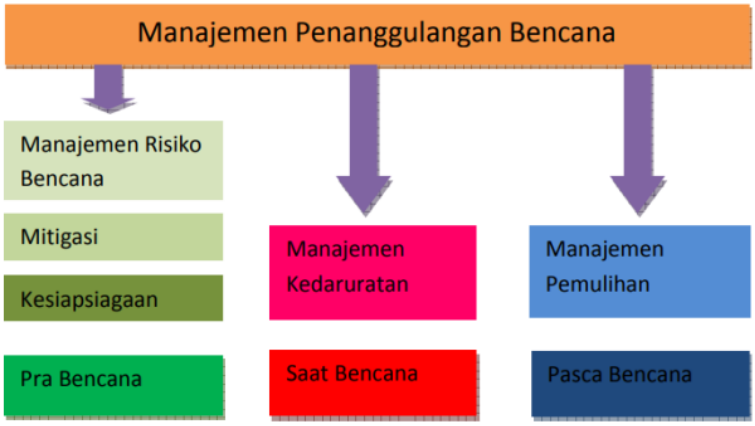

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana

Kapucu, N. (2008), manajemen bencana mencakup upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif bencana, termasuk dalam aspek pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, respons darurat, dan pemulihan pasca-bencana. Perry, R. W., & Quarantelli, E. L. (2005), menjelaskan manajemen bencana sebagai aktivitas yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai aktor yang bekerja bersama untuk menghadapi dan mengatasi bencana, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta.

McEntire, D. A. (2004), manajemen bencana sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh masyarakat dan organisasi untuk mengurangi kerentanan dan memitigasi dampak negatif dari bencana alam maupun yang disebabkan oleh manusia. Mileti, D. S. (1999), manajemen bencana melibatkan perencanaan yang baik, penggunaan teknologi, pengembangan kebijakan, pendidikan, penelitian, dan penyuluhan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Manajemen bencana menekankan pentingnya koordinasi dan

kolaborasi antar aktor terkait dalam mengurangi dampak bencana dan dengan demikian meningkatkan ketahanan masyarakat.

(1.) Tahapan Manajemen Bencana

Manajemen bencana melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengurangi risiko, merespon, dan memulihkan dampak dari bencana. Tahapan ini membantu pemerintah, organisasi, dan masyarakat untuk lebih efektif dalam menghadapi ancaman bencana. Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

(1) Tahap pra-bencana, yaitu yang dilaksanakan ketika tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana

(2) Tahap tanggap darurat, yaitu yang diterapkan dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.

(3) Tahap pasca bencana, yaitu yang diterapkan setelah terjadi bencana

Dalam keseluruhan tahapan penanggulangan bencana tersebut, ada 3 (tiga) manajemen yang dipakai yaitu :

(1) Manajemen Risiko

Adalah pengaturan/manejemen bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang bertujuan mengurangi risiko saat sebelum terjadinya bencana/pra bencana. Manajemen risiko ini dilakukan dalam bentuk :

(a) Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

(b) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

(c) Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan ini sebenarnya masuk manajemen darurat, namun letaknya di pra bencana. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

(2) Manajemen Kedaruratan

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana. Fase ini biasanya disebut dengan tanggap darurat.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

(3) Manajemen Pemulihan

Adalah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan fase-fasenya yaitu :

(a) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

(b) Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

McEntire, D. A., Fuller, C., Johnston, C. W., & Weber, R. (2002, tujuan manajemen bencana melibatkan pengurangan dampak negatif dari bencana, meminimalkan kerugian manusia dan ekonomi, serta menciptakan mekanisme yang efisien untuk respons dan pemulihan.Alexander, D. (2002), Alexander menegaskan bahwa tujuan manajemen bencana melibatkan perencanaan yang efektif, kesiapsiagaan, respons, pemulihan, mitigasi, dan peningkatan ketahanan komunitas terhadap efek bencana yang negatif.

Gundogdu, O. S., & Isik, O. (2013), tujuan manajemen bencana adalah melindungi masyarakat, aset, dan lingkungan melalui koordinasi, kolaborasi, dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pearce, L. (2003), tujuan utama manajemen bencana adalah mengurangi kerentanan dan

meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana melalui perencanaan komunitas yang berpartisipasi dan strategi mitigasi yang berkelanjutan.

(2.) Risiko Bencana

Risiko bencana adalah kemungkinan kerugian yang akan terjadi pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu karena bencana tersebut, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Selain kapasitas, risiko merupakan fungsi dari ancaman atau bahaya dengan kerentanan dan kapasitas. Risiko bencana dapat berkurang apabila kapasitas ditingkatkan atau kerentanan dikurangi, sedangkan risiko bencana dapat meningkat apabila kerentanan dan kapasitas meningkat. Dengan mengetahui pengertian ini, kita berada di ambang bencana. Meskipun bencana yang bisa mengancam setiap saat mungkin tidak dapat dicegah, kita dapat melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan pengetahuan kita tentang konsep dan pengertian dasar tentang risiko bencana.

(3.) Kerentanan

Kondisi komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk menghadapi ancaman bencana dikenal sebagai kerentanan. Faktor sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan membentuk komponen kerentanan. Eksposur (harus diperhatikan bahwa eksposur dapat dianggap sebagai bahaya atau kerentanan) bertemu dengan kerentanan. "Aset-aset" yang ditampilkan meliputi kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah ekonomi, struktur fisik, dan wilayah ekologi atau lingkungan. Sensitivitas setiap "aset" berbeda-beda tergantung pada bencana (dan seberapa parah bencananya).

Informasi keterpaparan adalah indikator utama yang digunakan dalam analisis kerentanan. Dalam kedua kasus, data dimasukkan ke dalam komposisi paparan. Komposisi paparan termasuk kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. Hanya dengan membagi faktor pembobotan sensitivitas dapat ditutupi secara tidak langsung. Untuk analisis kerentanan, informasi yang digunakan terutama berasal dari laporan BPS (Provinsi/kabupaten Dalam Angka, PODES, Susenan, PPLS, dan PDRB), serta informasi peta dasar Bakosurtanal tentang penggunaan lahan, jaringan jalan, dan lokasi fasilitas umum.

(4.) Kapasitas

Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, metode, dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mencegah, menanggulangi, meredam, dan dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Kapasitas dapat mencakup mencegah ancaman terjadi, mengurangi kekuatan dan volume ancaman, atau mengurangi kerentanan ancaman itu sendiri. Kapasitas dapat berbeda dari tempat ke tempat. Kapasitas daerah metropolitan menghitung kondisi infrastruktur.

(5.) Pengurangan Risiko Bencana (PRB)

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Gambar 2.2 Rumus PRB

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah:

1 Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang;

2 Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat;

3 Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar;

4 Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.

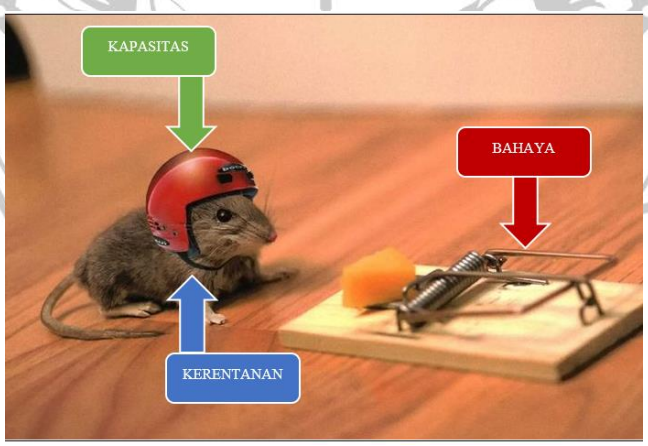

Gambar 2.3 Ilustrasi Kajian Risiko

2.3 Pariwisata

Didalam kamus besar indonesia, Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang/sekelompok orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan tujuan mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata mata untuk menikmati kegiataan reakreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Sigiama (2011) mengungkapkan bahwa pariwisata adalah rangkaian aktivitas, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya.

Menurut Pendit (1994), ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:

(1) Wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat,

kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni meraka.

(2) Wisata kesehatan, yaitu perjalanan seseorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani.

(3) Wisata olahraga, yaitu wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermakasud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau Negara.

(4) Wisata komersial, yaitu termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameranpameran dan pecan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

(5) Wisata industri, yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahhasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian, dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

(6) Wisata Bahari, yaitu wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut.

(7) Wisata Cagar Alam, yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

(8) Wisata bulan madu, yaitu suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasanganpasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan.

Smith, S. L. (1989), Pariwisata adalah aktivitas perseorangan atau kelompok yang dilakukan saat bepergian dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan kehidupan sehari-hari mereka untuk waktu yang relatif singkat, baik bisnis maupun hiburan. Burkart, A. J., & Medlik, S. (1981), Pariwisata sebagai kombinasi dari fenomena dan hubungan yang muncul dari interaksi wisatawan, pengusaha bisnis pariwisata, pemerintah, komunitas lokal, serta lingkungan dan ekonomi di destinasi wisata.

Mathieson, A., & Wall, G. (1982), Mathieson dan Wall menggambarkan pariwisata sebagai pergerakan orang ke dan tinggal di destinasi yang berada di luar lingkungan kehidupan sehari-hari mereka, dengan durasi tidak lebih dari satu tahun, untuk tujuan rekreasi, bisnis, dan kepentingan lainnya. Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1985), pariwisata adalah studi tentang perorangan yang bepergian ke dan tinggal di tempat yang berada di luar kehidupan rutin mereka, untuk durasi kurang dari satu tahun, dengan tujuan rekreasi, bisnis, dan kepentingan lainnya.

Dari berbagai definisi para ahli di atas, jelas bahwa pariwisata mencakup perjalanan dan kegiatan di luar rutinitas kehidupan sehari-hari seseorang, dengan tujuan rekreasi, bisnis, dan kepentingan lainnya. Definisi ini menekankan pentingnya interaksi antara wisatawan, industri pariwisata, pemerintah, komunitas lokal, dan lingkungan di destinasi wisata.

(1.) Industri Pariwisata

Secara umum masyarakat melihat bahwa industri adalah identik dengan bangunan pabrik secara kontinuitas melakukan proses produksi dengan menggunakan mesin-mesin dan berbagai teknologi. Tetapi akan sangat jauh berbeda ketika mengenal industri pariwisata. G.A. Schmool memberi batasan tentang industri pariwisata sebagai "Tourist is a highly decentralized industryconsisting of enterprises different in size, location, function, type organization,range of service provided and method used to market and sell them". Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu industri yang terdiri dari serangkaian perusahaan yang menghasilkan jasa atau produk yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan itu tidak hanya dalam jasa yang dihasilkan, tetapi juga dalam besarnya perusahaan, lokasi tempat kedudukan, bentuk organisasi yang mengelola dan metode atau cara pemasarannya (Muhammad Tahwin, 2003).

Batasan pariwisata sebagai suatu industri diberikan secara terbatas, hanya sekedar menggambarkan apa sebenarnya pariwisata itu. Dengan demikian dapat memberikan pengertian yang lebih luas. Jadi sebenarnya, ide memberikan istilah industri pariwisata lebih banyak bertujuan memberikan daya tarik supaya pariwisata dapat dianggap sebagai sesuatu yang berarti bagi perekonomian suatu Negara, terutama pada Negara-negara sedang berkembang. Industri pariwisata adalah keseluruhan rangkaian dari usaha menjual barang dan jasa yang diperlukan wisatawan, selama ia melakukan perjalanan wisata sampai kembali ke tempat asalnya.

Menurut Spillane (1987) dalam Badrudin (2001), ada lima unsur industri pariwisata yang sangat penting, yaitu:

(1) *Attractions* (daya tarik) Attractions dapat digolongkan menjadi site attractions dan event attractions. Site attractions merupakan daya tarik fisik yang permanendengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerahtujuan wisata seperti kebun binatang, keraton, dan museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinyadapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival,pameran, atau pertunjukan- pertunjukan kesenian daerah.

(2) *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan) Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Selain itu ada kebutuhan akan Support Industries yaitu toko souvenir, toko cuci pakaian, pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan).

(3) *Infrastructure* (infrastruktur) Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat yang juga tinggal di sana, maka ada keuntungan bagi penduduk yang bukan wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi perkembangan pariwisata

(4) *Transportations* (transportasi) Dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.

(5) *Hospitality* (keramahtamahan) Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

2.4 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDG's)

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada UN Summit on MDGs 2010 telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen *"The Future We Want"* dalam *UN Conference on Sustainable Development* 2012. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif

dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

(1.) Pilar Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

(a) Pilar Pembangunan Sosial

(b) Pilar Pembangunan Ekonomi

(c) Pilar Pembangunan Lingkungan

(d) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

2.5 Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlajutan (sustainability) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersedian lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul The Limit to Growth (Meadowet al.,1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis).

Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainable Tourism adalah pariwista yang berkembang sangat pesat, termasuk pertambahan arus kapasitas akomodasi, populasi lokal dan lingkungan, dimana perkembangan pariwisata dan investasi – investasi baru dalam sektor pariwisata seharusnya tidak membawa dampak buruk dan dapat menyatu dengan lingkungan, jika kita memaksimalkan dampak yang positif dan meminimalkan dampak negative. Maka beberapa inisiatif diambil oleh sektor public untuk mengatur pertumbuhan pariwisata agar menjadi lebih baik dan menempatkan masalah akan sustainable tourism sebagai prioritas karena usaha atau bisnis yang baik dapat melindungi sumber – sumber atau asset yang penting bagi pariwisata tidak hanya untuk sekarang tetapi dimasa depan. Beberapa ahli mengemukakan pariwisata berkelanjutan sebagai berikut :

(1.) Butler, R. W. (1999), Menurut Butler, pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan dan daerah tuan rumah saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka di masa depan. Pariwisata berkelanjutan harus menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Swarbrooke, J. (1999), Swarbrooke menggambarkan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan budaya lokal, sambil meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial bagi komunitas tuan rumah dan pengunjung.

(2.) Mowforth, M., & Munt, I. (2008), pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dikejar dengan cara yang ramah lingkungan, menghormati budaya dan tradisi lokal, menghasilkan manfaat ekonomi yang adil antara semua pihak yang terlibat, dan tidak merusak sumber daya alam dan warisan budaya.

(3.) Bramwell, B., & Lane, B. (2011), Bramwell dan Lane menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan melibatkan manajemen tujuan wisata dengan cara yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pelestarian warisan budaya dan lingkungan alam.

(1.) Prinsip – Prinsip Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada intinya berkaitan dengan usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang. “Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis

dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat" 20 (Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai „resep" pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip - prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Berikut adalah penjelasannya:

(1) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumbersumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuantujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

(2) Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement.

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

(3) Kepemilikan Lokal.

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

(4) Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan.

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteriakriteria dan standar-standar internasional.

(5) Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat.

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

(6) Daya Dukung.

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use).

(7) Monitor dan Evaluasi.

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

(8) Akuntabilitas.

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

(9) Pelatihan.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan programprogram pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topiktopik lain yang relevan.

(10) Promosi.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut

B. Kerangka Konseptual

Menurut Miles & Huberman, (1994), kerangka konseptual merupakan kerangka yang dapat berbentuk naratif atau grafis, yang mewakili variabel-variabel penting dan menjelaskan struktur dalam kaitannya dengan hubungan yang ada di antara variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam suatu penelitian haruslah terlihat jelas. Sebab apabila konsep dalam suatu penelitian tidak jelas akan menyebabkan persepsi yang berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini.

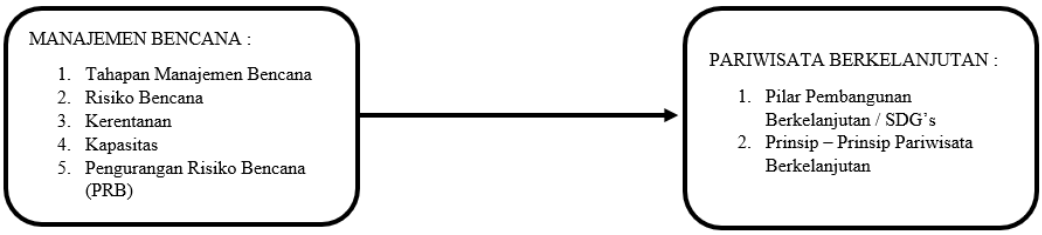

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka tersebut, peneliti akan berfokus terhadap bagaimana suatu manajemen bencana yang terintegrasi dengan baik dapat mendorong industri pariwisata yang berkelanjutan. Menggunakan studi kasus bencana yang pernah dihadapi oleh Jatim Park Group, peneliti akan mencari tahu bagaimana penerapan manajemen bencana yang baik dapat mendoron pertumbungan ekonomi yang baik, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, dan kepedulian terhadap isu lingkungan yang ada.

C. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung berjalannya penelitian ini dengan baik, maka diperlukan penelitian terdahulu agar memberikan pemahaman lebih mendalam kepada peneliti. Penelitian terdahulu ini menggunakan variable atau kondisi penelitian yang hampir serupa dengan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Nama Peneliti, Tahun, Judul	Mahardika dkk, 2023, "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Tangguh Bencana Melalui Kolaborasi dan Manajemen Pariwisata Kebencanaan Terintegrasi"
Fokus dan Tujuan Penelitian	Bertujuan untuk menjelaskan jenis serta dampak bencana dan juga kebijakan pariwisata Tangguh dan aman dari bencana, skema kolaborasi pengembangan pariwisata Tangguh bencana, dan implikasi manajemen pariwisata kebencanaan yang terintegrasi dalam rangka memberikan ketahanan sektor pariwisata.
Populasi, Sampel, dan Unit Analisisnya	Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Buku, Jurnal, Laporan, Peraturan, Data Statistik, serta berbagai artikel dari internet yang sesuai danrelevan dengan kebutuhan penelitian.
Metode Pengumplan	Dianalisis melalui pendekatan deskriptif analitis yang

dan Analisis Data	digunakan untuk mengelaborasi kebijakan pariwisata tangguh bencana dengan kolaborasi melalui pengaturan peran para pemangku kepentingan
Temuan Penelitian	Pembangunan destinasi pariwisata yang rentan dengan bencana, kedepan harus dapat disinergikan dengan kebijakan atau program atau masukan dari Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi kebencanaan, sehingga akan membantu dalam meminimalisir kerugian jika dikemudian hari akan terjadi bencana besar. Pengintegrasian kebijakan pariwisata dalam program kebencanaan, harus segera direalisasikan agar mampu memberikan dampak positif bagi pariwisata Indonesia dimasa mendatang.
Nama Peneliti, Tahun, Judul	Osmar, 2018, "Membangun Ketahanan (Resiliensi) Bencana Pada Kawasan Pariwisata (Studi Kasus: Kabupaten Pandeglang Pasca Tsunami Selat Sunda 2018)"
Fokus dan Tujuan Penelitian	Fokus dalam pencarian data informasi dari informan langsung untuk memverifikasi hasil kajian pustaka (desk study).
Populasi, Sampel, dan Unit Analisisnya	Karya ilmiah yang telah dipublikasikan seperti buku atau dokumen kajian, laporan penelitian, dan makalah.
Metode Pengumplan dan Analisis Data	Data didapat melalui kajian pustaka terhadap karya ilmiah yang telah dipublikasikan seperti buku atau

	dokumen kajian, laporan penelitian, dan makalah. Hasil kajian pustaka ditriangulasi dengan hasil wawancara terhadap stakeholder terkait, seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Badan Pengelola Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang, dan pelaku pariwisata.
Temuan Penelitian	Kemandirian dan ketahanan komunitas merupakan salah satu indikator utama ketahanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana. Dalam konteks manajemen pariwisata berkelanjutan, maka ketahanan bencana merupakan salah satu kunci utamanya. Model pentahelix dapat menjadi salah satu model kolaborasi dalam hal membangun ketahanan bencana pada skala komunitas.
Nama Peneliti, Tahun, Judul	Kriatian, 2023, "Pembelajaran Organisasi dalam Manajemen Bencana Perspektif Bisnis Pariwisata dan Kerawanan Bencana"
Fokus dan Tujuan Penelitian	mengevaluasi bagaimana bencana masa lalu menjadi pembelajaran organisasi bisnis pariwisata di Jawa Barat.
Populasi, Sampel, dan Unit Analisisnya	Populasi informan penelitian yang jumlahnya terbatas dan/atau menunjukkan kesediaan yang terbatas untuk berkolaborasi dengan peneliti, seperti manajer senior perusahaan pariwisata dan perhotelan
Metode Pengumplan	Metode penelitian kualitatif diadopsi untuk pengumpulan

dan Analisis Data	dan analisis data primer dalam penelitian ini, wawancara semi-terstruktur digunakan mengingat kekuatan analitis dan fleksibilitas desain yang ditawarkan. Sebelum wawancara formal dimulai, peserta studi yang mewakili bisnis pariwisata diminta untuk menguraikan rencana dan prosedur penanggulangan bencana yang diadopsi oleh bisnis masing-masing.
Temuan Penelitian	Temuan menunjukkan bahwa pengalaman masa lalu memberikan kesempatan belajar yang terbatas untuk bisnis pariwisata lokal, sehingga memperlihatkan kerentanan bisnis terhadap peristiwa bencana saat ini dan masa depan.
Nama Peneliti, Tahun, Judul	Ragmoun, 2021, "Achieving sustainable tourism with dynamic capabilities and resilience factors: A post disaster perspective case of the tourism industry in Saudi Arabia"
Fokus dan Tujuan Penelitian	Mendefinisikan dan menganalisis kemampuan dinamis (DC) untuk ketahanan organisasi (OR) untuk mencapai keberlanjutan dalam industri pariwisata (SST) di Arab Saudi
Populasi, Sampel, dan Unit Analisisnya	Sampel terdiri dari semua hotel, wisma tamu dan pondok-pondok di Arab Saudi (Qassim, Khobar, Riyadh, Makkah dan Madinah). Peserta dipilih menggunakan metode simple sampling. Responden secara resmi diminta melalui email dan panggilan telepon untuk meningkatkan kemungkinan tanggapan mereka.

Metode Pengumplan dan Analisis Data	Metode survei cross-sectional diadopsi untuk mengumpulkan data dari responden
Temuan Penelitian	Hasil utama Anda menunjukkan bahwa hanya dua dimensi DC yang penting dengan efek yang hebat dan positif yaitu belajar dan merasakan sebagai mediasi. Inovasi produk memediasi hubungan antara kemampuan dan kinerja penginderaan dan pembelajaran.
Nama Peneliti, Tahun, Judul	Bingjie, 2020, "Can post-disaster tourism development improve destination livelihoods? A case study of Aceh, Indonesia"
Fokus dan Tujuan Penelitian	Penelitian ini sangat tertarik untuk memperoleh wawasan tentang cara berpikir dan keyakinan kolektif di antara para peserta dan interaksi antara anggota kelompok ketika mereka membahas persepsi, keterlibatan, dan alasan di balik pengembangan pariwisata tsunami.
Populasi, Sampel, dan Unit Analisisnya	Snowball sampling digunakan untuk merekrut peserta, di mana para peneliti mencari rekomendasi awal dari antara subkelompok dalam populasi
Metode Pengumplan dan Analisis Data	Data yang digunakan untuk penelitian khusus ini diambil dari kelompok fokus wawancara yang dilakukan pada awal 2018.
Temuan Penelitian	Rekonstruksi dan pengembangan pariwisata pasca bencana di Aceh telah menambah daya tarik baru ke destinasi tersebut serta menyebabkan perubahan struktur

	sosialnya. Perkembangan wisata tsunami di Aceh tidak hanya telah mempengaruhi aset modal ekonomi, manusia, sosial, dan kelembagaan masyarakat, tetapi juga telah meningkatkan kesejahteraan penduduk dan masyarakat adaptif, yang keduanya merupakan elemen penting dari Ketahanan DestinasiHasil penelitian juga menunjukkan bahwa budaya lokal dan Agama memainkan peran penting dalam proses ini, di mana ia mempengaruhi warga. Interpretasi peristiwa bencana, persepsi mereka tentang pariwisata tsunami, dan bahkan keputusan mereka dalam berpartisipasi dalam pariwisata selama pemulihan fase

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwasannya manajemen bencana memiliki peran yang sangat krusial bagi sebuah tempat pariwisata. Tempat pariwisata menjadi sangat berbahaya jika tidak di dukung dengan adanya manajemen bencana yang baik, mengingat tempat pariwisata menjadi tempat berjalannya roda perputaran ekonomi banyak orang. Ancaman bahaya dapat menimbulkan dampak buruk bagi sebuah tempat pariwisata jika tidak adanya persiapan dalam menghadapi ancaman bahaya tersebut. Dengan adanya manajemen bencana yang terencana, maka perusahaan dapat mengetahui potensi ancaman bahaya yang akan terjadi kemudian dapat melakukan pencegahan dan persiapan terhadap potensi ancaman bahaya tersebut.